



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2022**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-23
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	III-4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkup Hidup Strategis	III-6
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	III-7
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII : PENUTUP.....	VIII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 merupakan Penjabaran dari Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan 5 (lima) tahunan kepala daerah (Pilkada) yang merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan sebagai tolak ukur pertanggung jawaban APBD berdasarkan penilaian kinerja selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam satu 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang maka di bentuklah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 11 tahun 2021 yaitu sebagai Lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman Modal , Pelayanan Perizinan, dan Tenaga Kerja.

Adanya perubahan Renstra dikarenakan ada perubahan PERDA No. 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019 – 2024 .

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja(DPMPTSP NAKER) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019–2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

- Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Sampang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 adalah menyediakan informasi mengenai rencana jangka menengah tahun 2019-2024 sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 adalah:

- a. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas, dan berkelanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dengan Renstra DPMPTSP NAKER Tahun 2019-2024 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang Penanaman Modal di Kabupaten Sampang dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang.
- b. Memberikan pedoman dan perencanaan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP NAKER selama lima Tahun.
- c. Menentukan tolak ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas, menumbuhkan kembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif dilingkungan masyarakat dan dunia usaha.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kabupaten Sampang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Sampang dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Perijinan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang menyelenggarakan Kedudukan dan Susunan Organisasi serta Fungsi DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi.
2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dan tugas pembantuan.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **menyelenggarakan fungsi:**

perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan iklim,

promosi :

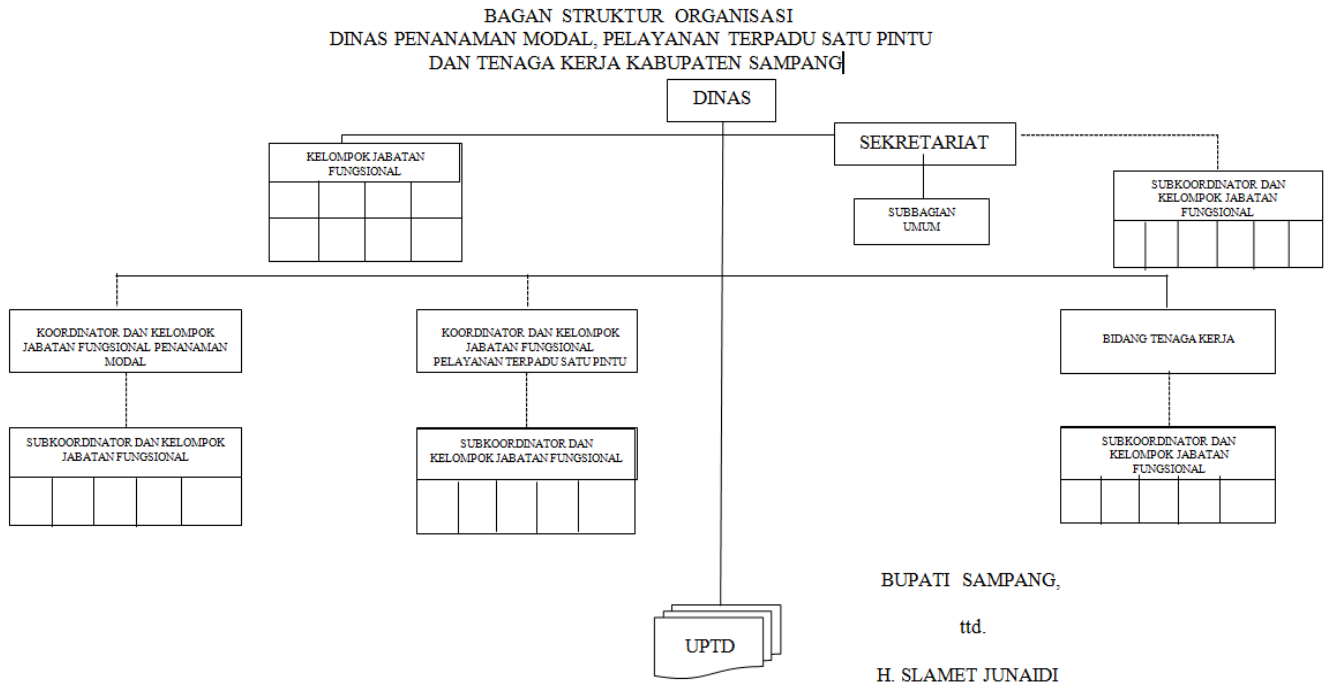
- a. Penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tenaga kerja dan transmigrasi;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang mengacu pada Peraturan Bupati Sampang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang pada Gambar 2.1 berikut :

**Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang
(LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 11 TAHUN 2022)**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG



Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Tenaga Kerja, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat terdiri atas :

- (1) **Sekretariat** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta bertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-

undangan;

- h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

(3) Bidang Tenaga Kerja terdiri atas :

1. Bidang Tenaga Kerja tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Tenaga Kerja.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Trasmigrasi;
 - b. melaksanakan pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten, menerbitkan Izin lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, pengelolaan Informasi Pasar, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), penerbitan serta perpanjangan izin kerja tenaga asing, pembinaan dan kerjasama pemerintah dan swasta ketenagakerjaan, perumusan program dan perencanaan pembinaan pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan, bursa

kerja informasi pasar kerja, analisa dan klarifikasi jabatan, serta dan bimbingan jabatan, serta penyuluhan dan bimbingan jabatan;

- c. pembinaan penempatan tenaga kerja umum, tenaga kerja muda penyandang cacat dan lanjut usia, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan para pengusaha, lembaga dan instansi dalam pertukaran informasi guna merealisasikan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja;
- d. melaksanakan pendaftaran dan seleksi kepada calon trasmigrasi, pementapan, pelatihan dan bimbingan mental kepada calon trasmigrasi, pelaksanaan pemindahan penduduk, pembinaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan, pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang penempatan perluasan kesempatan kerja dan trasmigrasi, Pencadangan tanah untuk kawasan trasmigrasi; dan

- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan, menganalisis data informasi kinerja serta mengadakan pemantauan dan evaluasi kinerja program kegiatan serta serapan anggaran bidang.

(4) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b angka 2, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya/keterampilannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud :
 - a. Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup fungsi Sekretariat, Bidang dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup fungsi Sekretariat, Bidang dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
3. Kepala Bidang dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Pejabat yang Berwenang dan melaksanakan tugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
4. Ketentuan mengenai pembagian tugas Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
5. Pada kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.

6. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Pejabat fungsional mulai melaksanakan fungsi terhitung sejak dilakukan pelantikan.

(5) UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

1. UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
3. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menyelenggarakan kegiatan organisasi didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Berikut ini adalah jumlah Personalia Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Adminstrasi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Menurut Jenis Kelamin

Uraian	Satuan	Jumlah
a. Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	Orang	21
2. Perempuan	Orang	13
Jumlah	Orang	34

Sumber : DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang, 2021

Analisis Gender di Dpmptsp Naker Kabupaten Sampang didominasi oleh laki laki sebanyak 21 orang atau 61,76 % dan Perempuan sebanyak 13 orang atau 38,23 % .

Tabel 2.2
Data Administrasi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Menurut Golongan dan Jabatan

Uraian	Satuan	Jumlah
JUMLAH PNS		34
1. Golongan I	Orang	0
2. Golongan II	Orang	2
3. Golongan III	Orang	25
4. Golongan IV	Orang	7
JUMLAH PNS	Orang	34
a. Pejabat Struktural		
1. Eselon II	Orang	1
2. Eselon III	Orang	2
3. Eselon IV	Orang	1
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL	Orang	4
b. Jumlah Pejabat Fungsional	Orang	14
c. Jumlah Staf PNS	Orang	18
JUMLAH	Orang	32

Sumber : DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang, 2021

Tabel 2.3
Data Administrasi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	0
2	Lulusan SLTP	Orang	1
3	Lulusan SLTA	Orang	6
4	Lulusan D.I	Orang	0

Perubahan Renstra Dpmptsp Naker Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

5	Lulusan D.II	Orang	0
6	Lulusan D.III	Orang	1
7	Lulusan D.IV	Orang	0
8	Lulusan S-1	Orang	16
9	Lulusan Pasca Sarjana / S-2	Orang	13
10	Lainnya	Orang	0
Jumlah		Orang	37

Sumber : DPMPPTSP NAKER Kabupaten Sampang, 2021

Di samping sumber daya yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Sarana dan Prasarana Pendukung di DPMPPTSP NAKER Kabupaten Sampang sampai saat ini belum cukup memadai. Adapun jenisnya tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana Prasarana di DPMPPTSP NAKER Kabupaten Sampang
(Posisi 30 Desember 2021)

No.	Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Sepeda motor	7	-	-	7
2	Station Wagon	1	-	-	1
3	Pompa Air	2	-	-	2
4	Teralis	1	-	-	1
5	Mesin Ketik	-	-	-	-
6	Mesin Ketik Elektronik	-	-	1	1
7	Mesin Printer	9	-	-	9
8	Filling Kabinet	4	-	-	4
9	Brankas	3	-	-	3
10	Lemari kayu	2	-	-	2
11	Alat penghancur kertas	-	-	1	1
12	Papan informasi	3	-	-	3
13	Papan info/papan baca	1	-	-	1
14	Papan nama instansi	1	-	-	1
15	Gorden	2	-	1	3

16	Almari	1	-	1	2
17	Meja kerja	35	-	-	35
18	Meja rapat	4	-	-	4
19	Sofa tamu	2	-	-	2
20	Kursi kerja	66	65	1	66
21	Kursi rapat	15	-	-	15
22	Karpet	1	-	-	1
23	Penunjuk waktu	-	-	-	-
24	Kulkas	1	-	-	1
25	A.C.	11	-	5	16
26	A.C. Unit	12	-	7	19
27	Televisi	3	-	2	5
28	Kamera digital	4	-	2	6
29	Ukiran	1	-	-	1
30	Lukisan/foto	1	-	-	1
31	Dispenser	1	-	1	2
32	Kamera/ cctv	10	-	-	10
33	Umbul-umbul	-	-	-	-
34	NoteBook	5	-	-	5
35	Software	1	-	-	1
36	Website dan Server	3	-	-	3
37	Scanner	8	-	2	10
38	Jaringan computer	1	-	-	1
39	Proyektor	2	-	-	2
40	Monitor	1	-	3	4
41	Mesin jilid	2	-	-	2
42	Telepon	-	-	1	1
43	Microphone	1	-	-	1
44	Loudspeker	1	-	-	1
45	Mesin Faximile	-	-	1	1
46	Bangunan gedung kantor permanen	1	-	-	1
47	Gedung kantor	1	-	-	1
48	Instalasi listrik	1	-	-	1
49	Instalasi PLTD kapasitas sedang	1	-	-	1
50	Ekonomi	1	-	-	1
51	Hukum	1	-	-	1

Sumber : DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Dpmpmsp Naker Kabupaten Sampang, 2021

Tabel T-C .23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang
Tahun 2019 - 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						REALISASI						CAPAIAN					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				2,38 %	2,85 %	3,22 %	3,08 %	2,78 %	2,35 %	2,81 %	2,41 %	3,35%	3,08 %	2,78 %	2,35 %	84,69%	118,26%	96,12%	100%	100%	100%
1.a	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan				94,83 %	94,98 %	75 %	95,26 %	95,39 %	95,52 %	95,73 %	56,91 %	75,9%	95,26 %	95,39 %	95,52 %	100,95%	59,92 %	101,2%	100%	100%	100%
2	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi				13,85 %	9,96 %	0,08 %	0,16 %	0,24 %	0,32 %	9,7%	-26,69 %	0,13%	0,16 %	0,24 %	0,32 %	70,03 %	-267,9 %	162,5%	100%	100%	100%
2.a	Nilai Realisasi Investasi				438.66 7,875	464.66 7,875	299.94 3,870	303.25 7,158	306.68 7,937	310.22 3,389	422.58 3,748	297.11 5,146	297.51 3,257	303.25 7,158	306.68 7,937	310.2 23,38 9	96,33 %	63,94 %	99,19%	100%	100%	100%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81,05	81,55	81,95	82,47	82,99	83,51	81,30	81,43	81,80	82,47	82,99	83,51	100,3 %	99,85 %	99,82%	100%	100%	100%
3.a	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				93,10	93,15	93,25	93,35	93,50	93,75	93,13	93,16	93,26	93,35	93,50	93,75	100,03 %	100,01 %	100,01%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 indikator sasaran “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD \leq 100%” atau tercapai 100%. Capaian indikator tersebut adalah 100,95 %, capaian Indikator sasaran RPJMD sebanyak 3 indikator dari 3 Indikator sasaran. Namun secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Dpmpptsp Naker Tahun 2019-2024 adalah 100 atau sangat baik.

Tabel T-C. 24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Kabupaten Sampang

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata - Rata Pertumbuhan	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(3)	(4)	(5)	(9)	(11)	(13)	(15)	(17)	(19)	(9)	(11)	(13)	(15)	(17)	(19)	(9)	(11)	(13)	(15)	(17)	(19)	(9)	(11)
Usuran Penanaman Modal																						
2.12.01.15	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor	269.163.000	140.049.086	-	-	-	-	248.539.200	136.411.280	-	-	-	-	92,33	97,40	-	-	-	-	339.187.543	316.744.840
2.12.01.16	Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	418.325.350	133.160.510	-	-	-	-	366.913.563	129.881.009	-	-	-	-	87,71	97,53	-	-	-	-	484.905.605	431.854.068
2.12.01.17	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin yang diterbitkan Tepat Waktu	370.207.900	178.370.680	-	-	-	-	233.634.780	168.447.350	-	-	-	-	63,10	94,43	-	-	-	-	459.393.240	317.858.455
2.12.01.18	Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti	97.935.800	38.745.022	-	-	-	-	82.140.751	32.566.400	-	-	-	-	83,87	84,06	-	-	-	-	117.308.311	98.423.951
2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	410.455.000	330.469.995	-	-	-	-	366.395.418	310.436.868	-	-	-	-	89,26	93,93	-	-	-	-	575.689.998	521.613.852
2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	1.104.950.650	321.772.295	-	-	-	-	1.104.180.025	315.739.490	-	-	-	-	99,93	98,13	-	-	-	-	1.265.836.798	1.262.049.770
2.12.01.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	32.000.000	2.000.000	-	-	-	-	31.408.624	1.900.000	-	-	-	-	98,15	95,00	-	-	-	-	33.000.000	32.358.624

2.12.01.04	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tepat waktu	48.155.000	31.534.709	-	-	-	-	48.076.590	19.008.000	-	-	-	-	99,84	60,28	-	-	-	-	63.922.355	57.580.590
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DAN PENANAMAN MODAL																						
2.07.03	Pogram Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang dilatih di BLK	-	-	0	37.464.000	833.358.207	869.993.311	-	-	0	37.464.000	833.358.207	869.993.311	-	-	0	100	100	100	1.088.320.535	1.088.320.535
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi	-	-	584.089.608	437.022.724	408.691.523	426.657.934	-	-	584.089.608	437.022.724	408.691.523	426.657.934	-	-	100	100	100	100	952.378.731	1.536.468.339
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	-	-	32.400.973	50.382.867	47.116.659	49.187.946	-	-	32.400.973	50.382.867	47.116.659	49.187.946	-	-	100	100	100	100	109.796.513	142.197.486
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Potensi Investasi	-	-	13.849.852	116.930.706	202.867.576	211.785.799	-	-	13.849.852	116.930.706	202.867.576	211.785.799	-	-	100	100	100	100	372.744.732	386.594.584
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	-	-	13.450.251	162.310.211	151.788.005	158.460.729	-	-	13.450.251	162.310.211	151.788.005	158.460.729	-	-	100	100	100	100	353.713.398	367.163.649
2.18.05	Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	-	-	438.270.940	174.084.978	511.115.565	533.584.621	-	-	438.270.940	174.084.978	511.115.565	533.584.621	-	-	100	100	100	100	818.596.698	1.256.867.638
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	-	-	77.952.409	194.574.920	225.293.173	235.197.243	-	-	77.952.409	194.574.920	225.293.173	235.197.243	-	-	100	100	100	100	478.667.404	556.619.813
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu	-	-	113.082.729	218.473.142	204.310.019	213.291.653	-	-	113.082.729	218.473.142	204.310.019	213.291.653	-	-	100	100	100	100	476.106.074	589.188.803
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-					-	-					-	-	100	100	100	100		
2.18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	-	-	5.047.587.496	5.829.996.002	5.452.050.458	5.691.727.026	-	-	5.047.587.496	5.829.996.002	5.452.050.458	5.691.727.026	-	-	100	100	100	100	12.704.978.217	17.752.565.713

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2019 - 2024 sebesar 100 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 100 persen. Hal ini disebabkan oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran program/kegiatan DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang yang dialokasikan dari Tahun 2019 - 2024. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 100 persen dan realisasinya sebesar 100 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi pada Program **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** target sebesar 100 persen dan realisasinya sebesar 99,93 persen. Hal ini dikarenakan pada program tersebut ada pada Tahun 2019 dan 2020 sehingga nilai rata-rata pertumbuhannya cukup signifikan. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada Belanja Langsung terdapat pada program **Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Pelaporan Pelayanan Informasi Publik** dengan target sebesar 100 persen dan realisasi sebesar 60,28 persen. Hal ini dikarenakan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Dinas dan dianggarkan sesuai dengan kebijakan Tim Anggaran Pendapatan Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi.

Tabel 2.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dpmptsp Naker Kabupaten Sampang
sampai dengan Tahun 2021 terhadap Sasaran Renstra
Dpmptsp Provinsi dan Renstra BKPM RI

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Dpmptsp Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra BKPM RI
1	2	3	4	5
1.	Nilai Realisasi Investasi		1. Pengumpulan Data Investasi Tepat Waktu	1. Banyaknya Investor untuk meningkatkan laju pertumbuhan nilai investasi
a.	Jumlah Peluang Investasi	100%		
b.	Jumlah investor (PMDN/PMA)	100%		
c.	Jumlah Pelaku Usaha yang melapor di LKPM	85%	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Penunjang Investasi	
d.	Nilai Investasi PMDN	76%		
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	103%	-	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	75%		
a.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	68,18%		
b.	Jumlah Pengangguran dan Pencari Kerja yang dilatih	100%		
c.	Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi	100%		
d.	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	100%		

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara Renstra Dpmptsp Naker Kabupaten Sampang dengan Dpmptsp Provinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra DPMPSTP NAKER Kabupaten Sampang yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Dpmptsp Provinsi Jawa Timur.

2.4.1 Hasil Telaahan terhadap RTRW

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang yang dilaksanakan

tidak terkait dengan lokasi atau penempatan fasilitas tertentu, **melainkan** diatur dalam ketentuan penataan ruang dan dampak lingkungan hidup. Sehingga tidak memerlukan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi/ pelayanan/ wilayah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah masing – masing.

2.4.2. Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan. Tetapi pelayanan yang dilaksanakan Oleh Dpmpstsp Kabupaten Sampang tidak terkait dengan lokasi/ penempatan fasilitas tertentu atau diatur dalam ketentuan penataan ruang sehingga tidak memerlukan Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi/ pelayanan / wilayah yang manjadi tanggung jawab perangkat daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP NAKER) berpedoman pada Peraturan Bupati Sampang Nomor 11 tahun 2022 tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kabupaten Sampang. Perbup tersebut menjadi dasar pada pelaksanaan tugas urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan PTSP sekaligus dalam menentukan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kabupaten Sampang yang harus diselesaikan pada periode lima tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP NAKER

Berdasarkan Tugas dan Fungsi **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER)** serta masukan dari penyelenggara pelayanan Kabupaten Sampang teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

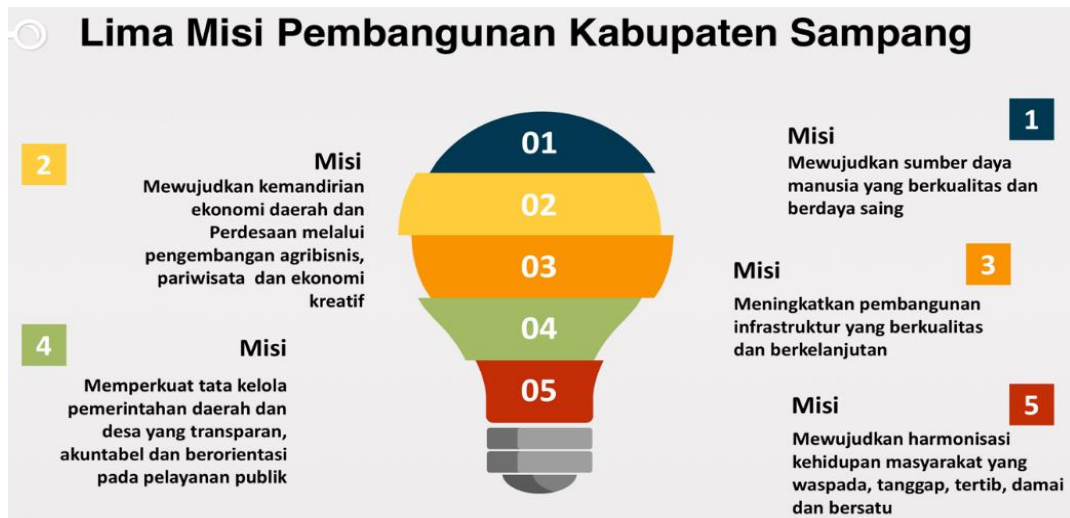
No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah/ tindak lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas dan kualitas	Pelayanan yang diberikan kurang maksimal	Pengajuan tambahan karyawan/PNS
2	Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelayanan perijinan	Sarana dan Prasarana yang terbatas	Pengajuan Sarana dan Prasarana
3	Kurangnya konsistensi UMKM di dalam menjalankan usahanya	Kesulitan UMKM didalam memasarkan produknya	Koordinasi dengan UMKM dan dinas terkait terkait pemasaran usaha

Sumber : Dpmptsp Naker Kabupaten Sampang, 2021

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 ditentukan visi dan misi Kabupaten Sampang sebagai berikut :

“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Misi Bupati dan Wakil Bupati Sampang

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- b. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
- d. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik
- e. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi DPMPTSP mendukung pada pencapaian misi 2 dan Misi 4 yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif”** dan **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSP NAKER yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Program Kabupaten Sampang terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>"Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik".</p> <p>Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah dengan pelayanan yang berkualitas</p>	<p>1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal</p> <p>2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$" secara sempurna</p>	<p>1. Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi</p> <p>2. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan system teknologi informasi</p> <p>3. Peningkatan kerjasama dn koordinasi antara PTSP dengan dinas teknis terkait sectoral dalam nota kesepahaman</p> <p>4. Meningkatnya kebutuhan warga untuk memperoleh kejelasan dan kepastian waktu untuk mengurus perizinan dan non perizinan</p> <p>5. Partisipasi langsung dari warga dalam menyampaikan keluhan dan pengaduan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan</p> <p>6. Adanya perizinan dan non perizinan yang membutuhkan</p>	<p>1. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan Daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan</p> <p>2. Adanya anggaran khusus untuk Tim Teknis dalam melaksanakan proses peninjauan lapangan</p> <p>3. Adanya aplikasi perizinan baru yakni OSS (Online Single Submisiion) yang sedang dikembang kan</p> <p>4. Dukungan OPD teknis terkait</p>

			peninjauan atau pemeriksaan lapangan sementara petugas atau SDM yang dimiliki terbatas	
--	--	--	--	--

Sumber : Dpmpptsp Naker Kabupaten Sampang, 2020

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang akan mengemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur beserta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dpmpptsp Provinsi Jawa Timur: 1 SDM Perencana yang berkualitas dan profesional 2 Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif 3 Perencanaan dan Evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	1. Sistem yang tersedia belum di manfaatkan secara maksimal 2. Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	1. Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Penanaman Modal 2. Keterbatasan SDM pada Dpmpptsp dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dpmpptsp secara ideal 2. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 3. Perkembangan teknologi dan

					informasi
		<p>Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI :</p> <p>1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal</p>	<p>1. Masih terlambatnya penyampaian LKPM</p>	<p>1. Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan (gap) antara pengajuan perizinan investasi (ijin prinsip) dengan realisasi</p>	<p>1. Terdapatnya wewenang dalam pengawasan penanaman modal yang lebih efektif</p>
		<p>2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanaman modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal</p>	<p>1. Perlu adanya updating data peta potensi investasi setiap tahunnya</p>	<p>1. Belum terdapat perhitungan prospektus secara riil di kabupaten sampang</p>	<p>1. Tersedianya peluang dan potensi investasi di Kabupaten Sampang</p>
		<p>3.. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementasi dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas</p>	<p>1. Belum tersedianya Rencana umum penanaman modal (RUPM) di Kabupaten Sampang</p>		<p>1. Tersedianya peta potensi investasi</p>

Sumber : Dpmpstsp Naker Kabupaten Sampang, 2021

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkup Hidup Strategis

Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang yang dilaksanakan tidak terkait dengan lokasi / penempatan fasilitas tertentu, melainkan diatur dalam ketentuan penataan ruang dan dampak lingkungan hidup. Sehingga tidak memerlukan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi / pelayanan/ wilayah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja	Kurangnya Pembukaan Lowongan Pekerjaan	Kinerja Pengangguran yang Masih kurang paham dengan pekerjaan yang sudah disediakan	Terdapat Pelatihan di BLK dengan menggunakan Media social yang sudah terupdate setiap hari.
2	Meningkatkan realisasi penanaman modal yang inklusif melalui pengendalian penanaman modal	Masih terlambatnya penyampaian LKPM	Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan (gap) antara pengajuan perizinan investasi (izin prinsip) dengan realisasi	Terdapat wewenang dalam pengawasan penanaman modal yang lebih efektif
3	Meningkatnya minat penanaman modal berdasarkan izin prinsip	Perlu adanya updating data peta potensi investasi setiap tahunnya	Belum terdapat Prospektus secara riil yang menjadi dasar promosi investasi di Kabupaten Sampang	Terdapat sejumlah UMKM yang telah berfasilitasi dalam kerja sama dengan perusahaan skala besar
		Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di tingkat Kabupaten Sampang		Terdapat peta potensi investasi di Kabupaten Sampang
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan prima	Sistem yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	Telah berjalannya UPTSA dan PTSP dalam penanganan pengurusan Izin penanaman modal
				Proses perizinan investasi yang mudah dan cepat

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat Daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*) kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Identifikasi Faktor internal yaitu :

Kekuatan (*strength*) :

- a. Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sampang
- b. Meningkatkan Para Pencari Kerja untuk Memperoleh pekerjaan dengan adanya Job Fair
- c. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
- d. Kelengkapan sarana dan prasarana
- e. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang menangani perizinan dan non perizinan
- f. Peta potensi investasi
- g. Kewenangan perizinan terpadu melalui PTSP

Kelemahan (*Weakness*) :

- a. Kurangnya Pengetahuan Pencari Kerja
- b. Keterbatasan akses informasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia terkait Sektor Logistik
- c. Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal
- d. Belum tersedianya potensi area logistic sebagai destinasi

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

Peluang (*Opportunities*)

- a. Penerapan Pelatihan kerja di BLK
- b. Penerapan Informasi Lowongan Pekerjaan melalui Media Sosial
- c. Penerapan SPIPISE dan OSS
- d. Pengembangan industry kreatif berbasis produk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi lokal

Ancaman (*Threats*)

- a. Akses Sosial media yang kurang dipahami oleh Masyarakat untuk memperoleh Pekerjaan yang sudah di Upload oleh website BLK.sampang
- b. Akses infrastruktur pendukung kegiatan logistik
- c. Adanya pengaduan masalah perijinan
- d. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perijinan online
- e. Ketidaksesuaian kepemilikan perizinan

Adapun isu-isu strategis yang berkembang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Bagi Pencari Kerja di BLK
2. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sampang.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi.
6. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
7. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang mendukung pada 2 misi yakni : **misi 2** mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif”** dan **misi 4** mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai DPMPTSP NAKER dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran renstra DPMPTSP NAKER Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPSTP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Tujuan:											
	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,48	2,81	2,41	3,35	3,08	2,78	2,35	2,35
	Sasaran:											
	Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	94,66	95,73	56,91	75,9	95,26	95,39	95,52	95,52
2.	Tujuan:											
	Meningkatkan Investasi Daerah	2	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	%	13,80	9,7	-29,69	0,13	0,16	0,24	0,32	0,32
	Sasaran:											
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp.	385.297,435	422.583,748	297.115,146	297.513,257	297.823,870	298.523,870	299.472,870	299.472,870
3	Tujuan:											
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,40	81,30	81,43	81,80	82,47	82,99	83,51	83,51
	Sasaran:											
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93,01	93,13	93,16	93,26	93,35	93,50	93,75	93,75

Sumber : Dpmpstp Naker Kabupaten Sampang, 2021

Perubahan Renstra Dpmpstp Naker Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama diambil dari Indikator sasaran strategis dimana IKU yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah Sebagai berikut :

1. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
2. Nilai Realisasi Investasi
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan	<i>Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan</i>	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan <hr/> Jumlah pendaftar pencari kerja X 100 %	<i>Hasil dari para peserta pencari kerja</i>	<i>Bidang Tenaga Kerja</i>
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	<i>Nilai realisasi investasi</i>	<i>Jumlah Nilai Investor yang mendaftar di Tahun tersebut yang realisasi mempunyai Investasi berskala Nasional (dalam rupiah)</i>	<i>Laporan data realisasi investasi</i>	<i>Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, dan Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal</i>
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur}}{\text{Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi}}$	<i>Hasil Survey, Laporan data dan Dokumen SKM</i>	<i>Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Bidang Pengaduan Kebijakan dan pelaporan Layanan</i>

Sumber : Dpmpstsp Naker Kabupaten Sampang, 2022

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Dpmpstsp haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Dpmpstsp Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran "**Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif** " dan **misi 4** yang mendukung pada pencapaian sasaran "**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**"

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Pedesaan Melalui Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
T.2	Meningkatnya Pemeratan dan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan Pedesaan melalui pengembangan Agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	IT.3	Pertubuhan Ekonomi	Meningkatnya Pemeratan dan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan Pedesaan melalui pengembangan Agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengurangi Pengangguran dengan membuka Pelatihan Kerja di BLK	DPMPTSP NAKER
		IT.4	Indeks Gini			
		IT.5	Indeks Kinerja Agribisnis			
S.8	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	IS. 9	Tingkat Pengangguran Terbuka		Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis IT melalui OSS	
S.11	Meningkatnya Pengelolaan Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif	IS.13	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi			
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (<i>e-government</i>) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik	BAG. ORGANISASI, DISPENDUKCAPIL, DPMPTSP NAKER, SEKRETARIAT DPRD, DAN 14 KECAMATAN
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

Sumber : DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang, 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan DPMPSTP NAKER Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi DPMPSTP NAKER Kabupaten Sampang

SW OT	<u>Kekuatan / Strength</u> Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dpmpstp Naker secara ideal	<u>Kelemahan / Weakness</u> 1 Koordinasi dalam hal perencanaan dan litbang masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM
<u>Peluang / Opportunity</u> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan 3 Perkembangan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan • Menerapkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian berbasis spasial, teknologi dan informasi 	Meningkatkan SDM Bidang Tenaga Kerja, Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
<u>Ancaman / Threat</u> Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai: a. Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi di bidang pelayanan perijinan

Sumber : DPMPSTP NAKER Kabupaten Sampang, 2021

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada Bab sebelumnya maka strategi dan arah kebijakan DPMPSTP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
--------	---------	----------	----------------

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

<p>Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja</p>	<p>Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dengan pembuatan Kartu Kuning • Memudahkan Pencari kerja dengan mengikuti Pelatihan kerja di BLK 	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan sistem kerjasama dengan Perusahaan – perusahaan. • Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi • Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem layanan perizinan bagi investor
<p>Meningkatnya Investasi Daerah</p>	<p>Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan berinvestasi dengan meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor • Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi • Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan perizinan terutama pengelolaan izin-izin strategis untuk mempercepat proses layanan dan akurasi pengendalian sektoral. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan sistem kerjasama investasi • Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi • Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem layanan perizinan bagi investor
<p>Meningkatnya kualitas pelayanan perizinani</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal • Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya • Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan perizinan • Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi sebagai alat perencana, pelayanan pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi • Merumuskan sistem promosi investasi baik dalam skala nasional, regional maupun internasional • Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem layanan perizinan bagi investor • Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perizinan

Beberapa inovasi DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang antara lain:

INOVASI DAERAH	DESKRIPSI / KETERANGAN	KOORDINATOR
<p>CEK RESI (Pendampingan dalam rangka laporan LKPM untuk Realisasi Investasi dengan melalui turun langsung kepemohon atau pelaku usaha)</p>	<p>Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi pembangunan perekonomian daerah, walaupun Usaha Kecil dan Menengah masih memiliki persoalan-persoalan yang kompleks. Untuk memajukan ekonomi masyarakat yang bergerak di sektor UMKM perlu adanya dukungan dari semua pihak, Pemerintah dan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker membuka program fasilitasi kemitraan Usaha Besar dengan UMKM untuk memperoleh akses pasar yang lebih besar sehingga membuka peluang bagi tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil Menengah</p>	<p>DPMPTSP NAKER BIDANG PENANAMAN MODAL</p>
<p>JUNING RESI (Juru Peningkatan Realisasi Investasi disetiap Kecamatan yang nantinya dapat membantu dalam pencapaian realisasi)</p>	<p>Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu salah satu tugas pokok dan fungsinya melakukan pengendalian atas pelaku usaha di Kabupaten Sampang dalam bentuk pemeberian fasilitasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang setiap tahun dilaksanakan. Setelah melakukan kegiatan tersebut terdapat kendala atau permasalahan di lapangan yang salah satunya pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban melakukan pelaporan yang setiap tiga bulan sekali harus dilaporkan. Berawal dari permasalahan tersebut DPMPTSP melakukan perubahan system kinerja dengan pembetulan tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam pengisian laporan kegiatan penanaman modal dengan cara melakukan pendampingan pengisian LKPM Online.</p>	<p>DPMPTSP NAKER BIDANG PENANAMAN MODAL</p>
<p>PACAR BISA (Pangkalan Cari Izin Bagi Masyarakat)</p>	<p>Kehadiran layanan antar jemput pengurusan perizinan berusaha (IUMK) bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sampang dan fenomena munculnya berbagai Inovasi disektor publik memberi warna baru bagi Pengusaha untuk melakukan permohonan izin secara langsung melalui Mobil Keliling yang mangkal untuk menarik minat masyarakat dalam membuat surat izin usaha sehingga dapat membantu tercapainya Nilai Realisasi Investasi.</p>	<p>DPMPTSP NAKER BIDANG PELAYANAN PERIZINAN</p>
<p>MO - LING LING (Mobil Keliling Konseling dalam rangka memberikan layanan tentang masalah</p>	<p>Kehadiran layanan Mobil Keliling Konseling ini Bermanfaat Bagi Pencari Kerja atau mempermudah pencari kerja dengan memfasilitasi Kartu Kuning agar mudah untuk mendapatkan pekerjaan.</p>	<p>DPMPTSP NAKER BIDANG TENAGA KERJA</p>

<p>Pencari Kerja</p>		
<p>MINI JOB FAIR (Lowongan Persyaratan Pencari Kerja dalam kapasitas yang lokasi kecamatan/ kelurahan / desa sekolah)</p>	<p>Kehadiran layanan Mini Job Fair merupakan mitra kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis di dalam melaksanakan kegiatan antar kerja sekaligus sebagai salah satu sarana utama dalam melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia. Agar pencari kerja lulusan (alumninya) dapat disalurkan dan ditempatkan suatu pekerjaan/jabatan yang sesuai dengan bakat, minat pendidikan, pengalaman dan ketrampilan. Dapat mengisi lowongan pekerjaan / jabatan yang tersedia sesuai yang diinginkan oleh pengguna tenaga kerja, serta dapat melayani secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan mekanisme sistim Antar Kerja. Diharapkan nantinya para lulusan/ alumni SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Sampang dapat di fasilitasi penempatan tenaga kerjanya melalui Mini Job Fair.</p>	<p>DPMPSTP NAKER BIDANG TENAGA KERJA</p>

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang memiliki program yang akan dikelola selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2024) yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja akan menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sampang selama 5 tahun kedepan. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan di mana kegiatan dan Sub Kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Oleh karena itu, rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Penjabaran program dan kegiatan serta Sub Kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP NAKER.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsure masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) ditampilkan pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel T - C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Mendukung Misi 2

No	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.2 Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif									
IT.3	Pertumbuhan ekonomi	4,93	5,34	5,47	5,61	5,75	5,89	6,02	6,02
IT.4	Indeks Gini	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27
IT.5	Indeks Kinerja Agribisnis	74,25	74,52	74,94	75,21	75,68	76,12	76,53	76,53
S.8 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja									
IS. 9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,48 %	2,38 %	2,33 %	3,22 %	3,08 %	2,78 %	2,35 %	2,35 %
S.11 Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif									
IS.14	Persentase kenaikan realisasi investasi	13,80 %	13,85 %	9,96 %	0,08 %	0,16 %	0,24 %	0,32 %	0,32 %

Mendukung Misi 4

No	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
S.16 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik									
IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,40	81,30	81,43	81,80	82,47	82,99	83,51	83,51
IS.25	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,01	93,10	93,15	93,25	93,35	93,50	93,75	93,75

Sumber : Dpmtsp Naker Kabupaten Sampang, 2022

Tabel 7.1

Keterhubungan Renstra DPMPTSP NAKER dengan RPJMD Kabupaten Sampang

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DPMPTSP NAKER		SASARAN RENSTRA DPMPTSP NAKER		Kondisi Awal (2018)	REALISASI			TARGET			Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	INDIKATOR	URAIAN		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Nilai PDRB					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka			2,48	2,81 %	2,41 %	3,35 %	3,08 %	2,78 %	2,35 %	2,35 %
				Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	94,66 %	95,73 %	56,91 %	75,9%	95,26 %	95,39 %	95,52 %	95,52 %
		Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi			13,80 %	9,7 %	-26,69 %	0,13 %	0,16%	0,24 %	0,32 %	0,32 %
				Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi (Juta Rp.)	385.297,435	422.583,748	297.115,146	297.513,257	303.257,158	306.687,934	310.223,389	310.223,389

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					80,40	81,30	81,43	81,80	82,47	82,99	83,51	83,51
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80,40	81,30	81,43	81,80	82,47	82,99	83,51	83,51
				Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,01	93,13	93,16	93,26	93,35	93,50	93,75	93,75

Sumber : Dpmpstsp Naker Kabupaten Sampang 2021

Tabel 7.2
**KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA PADA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Mengacu pada :										
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang dilatih di BLK	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang dilatih di BLK	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pengangguran dan Pencari Kerja yang dilatih	Orang
									Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun</i>	<i>Orang</i>
									Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/ Kota	Jumlah Peralatan dan sarana untuk pelatihan di BLK yang di pelihara	Unit
										<i>* Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>	<i>Unit</i>
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitas	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitas	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Sosialisasi bursa Tenaga Kerja dan Rekrutmen Tenaga Kerja	Orang
										Jumlah Perpindahan Masyarakat ke Daerah Transmigrasi (KK)	KK
										<i>* Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang tersedia dan/ atau Ditingkatkan Kompetensinya</i>	<i>Orang</i>
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Sosialisasi Bursa Tenaga kerja	Orang									

								Bagi Pencari Kerja	<i>* Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>	<i>Orang</i>		
								Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitasi	Job Fair/ Bursa Kerja	Job Fair	Kegiatan
										<i>*Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja</i>	<i>Orang</i>	
								Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitasi	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pendampingan PMI bermasalah	Orang
										<i>* Jumlah CPMI / PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>	<i>Orang</i>	
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	Penyelenggaraan pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Perusahaan
											Penyusunan UMK	Peraturan
											Jumlah Kecamatan yang di data dan di survey (KHL dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten	Kecamatan
											<i>*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek</i>	<i>Laporan</i>
							Pencegahan dan Peyelesaian Perselisihan	Persentase Sengketa Pengusaha	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yangdiselesaikan	Kasus	

							Hubungan Industrial , Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Pekerja yang diselesaikan	Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	* Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Potensi Investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Jumlah Peluang Investasi	Penyediaan peta Potensi dan peluang usaha Kabupaten/kota	Jumlah Prospektus Kabupaten	Prospektus
									Rapat- rapat perencanaan Penanaman Modal dan RKPPMD	Kali	
									*Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Dokumen	
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	Penyelenggara n Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Investor	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Investor dan Jumlah Pameran yang diikuti	Matcmaking
									* Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / kota	Dokumen	
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	Pengendalain Pelaksanaan Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan	Pelaku Usaha
				* Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha						

									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha
										Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	Kali
										<i>* Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman modal</i>	<i>Pelaku Usaha</i>
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	Pelaku Usaha
										<i>* Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan</i>	<i>Kegiatan Usaha</i>
					PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Investasi PMDN	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan Inforasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pengembangan sistem Informasi Penanaman Modal (SIPP)	Paket Aplikasi
										Jumlah Pengolahan Data Penanaman Modal	Laporan
										<i>* Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik yang di olah, Dikaji dan Dimanfaatkan.</i>	<i>Dokumen</i>

3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin OSS	Izin
						Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti		Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah Izin Non OSS	Izin
										<i>* Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Pelaku Usaha</i>
										Jumlah Laporan tindak lanjut yang ditangani	Laporan
										Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Perizinan dan Non Perizinan	Kali
										Jumlah Laporan SP, Maklumat Pelayanan, Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.	Laporan
										<i>* Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</i>	<i>Orang</i>

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja, SOP)	Dok
					<i>*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>dokumen</i>
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dok
					<i>*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>dokumen</i>
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dok
						<i>*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD yang disusun	Dok
						<i>*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang disusun	Dok

										*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen			
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)	Dok		
										*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen			
										Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	Orang
												Jumlah Kontrak Daerah yang dibayarkan	OB	
												*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	
												*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dok	
												*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	Dok
										Jumlah Dokumen RKPBMMD	Dok
										* Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen
									Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Semesteran Barang Milik Daerah	Dok
										* Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang
										* Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	Orang
										* Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Jenis
										*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	Jenis
										Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis
										Jumlah Spanduk/ Umbul-umbul/ Bendera yang diadakan	Jenis
										*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis
										*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jenis
										Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	Jenis
										*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exlemplar
										*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	dokumen

									<i>Disediakan</i>	
								Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	Ob
									*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	<i>laporan</i>
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	Orang
									Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kali
									Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kali
									Jumlah kebutuhan BBM	Liter
									*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>laporan</i>
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit
									*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	<i>unit</i>
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun/ di rehab	Unit
									*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	<i>unit</i>
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase penyediaan jasa	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat

							<p>Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>penunjang urusan pemerintahan daerah</p>		<p>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p>	<p>laporan</p>
									<p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p>	<p>Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi</p>	<p>Bulan</p>
										<p>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</p>	<p>laporan</p>
									<p>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	<p>Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p>	<p>OB</p>
										<p>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</p>	<p>laporan</p>
							<p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara</p>	<p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p>	<p>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara</p>	<p>Unit</p>
										<p>Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan</p>	<p>Unit</p>
										<p>*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</p>	<p>unit</p>
									<p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p>Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara</p>	<p>Unit</p>
										<p>*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</p>	<p>unit</p>

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit		
										<i>*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>unit</i>		
									Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	Dok
												Jumlah Promosi pelayanan Publik Perangkat Daerah	Kali
												<i>*Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	<i>laporan</i>

Tabel 7.3
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2024
PMDN 17/2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	REALISASI KINERJA SEBELUM KINERJA AWAL (PREBASELINE)		2018	REALISASI		TARGET PADA PERUBAHAN RPJMD 2019-2024				Target Akhir Kinerja RPJMD
			2016	2017		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
II.	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	Tenaga Kerja											
	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih di BLK	%				97,50	38,00	68,18	68,75	69,23	69,29	69,29
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)*	%	N/A	N/A	N/A	50%	50%	80%	82%	85%	87%	87%
	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri*	orang	N/A	N/A	N/A	346	647	550	566	575	580	580
	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya*	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	20	25	30	30
	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri*	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	160	400	400	400	400
12	Penanaman Modal											
	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	%			13,8	9,70	(29,69)	0,08	0,16	0,24	0,32	0,32
	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal*	juta rupiah	N/A	N/A	N/A	422.583.748	297.115.146	299.943.870	303.257.158	306.687.934	310.223.389	310.223.389

III	Fokus Iklim Berinvestasi											
	Indeks Toleransi	-	-	-	3,52	3,65	3,67	-	-	-	-	-
	Indeks Risiko Bencana	-	-	-	154,8	140,68	127,19	-	-	-	-	-
	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai investasi PMDN	juta rupiah	N/A	N/A	385.297,00	542.274,00	629.178,00	654.171,00	745.128,00	849.046,00	967.866,00	967.866,00
IV	Fokus Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Tingkat Ketergantungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rasio Ketergantungan	%	-	-	40,92	44,91	47,59	47,59	46,28	45,17	44,50	44,5
b.	Kualitas Tenaga Kerja											
	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	-	-	94,66	95,73	56,91	75,00	95,26	95,39	95,52	95,52
	Rasio lulusan S1, S2, S3	-	-	-	2,57	2,77	4,92	5,67	6,42	7,17	7,92	7,92

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah sangat baik.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Pengendalian dan evaluasi atas target-target sasaran dalam RPJMD masih belum optimal, koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang DPMPTSP NAKER masih belum optimal, SDM pada DPMPTSP NAKER dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas, usulan kajian kelitbang Perangkat Daerah masih belum terakomodir secara maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang mendukung pada misi 2 dan misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif” dan “Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP NAKER.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan oleh DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP NAKER dalam kurun waktu lima tahun.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN

TABEL T- C. 27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR				UNIT KERJA	LOKASI				
							2019				2020				2021		2022				2023		2024	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23		
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA LAMA (DI ISI REALISASI 2018-2020)																								
1. Meningkatnya Investasi Daerah				Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	%	13,80	9,7	-	-26,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,69	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
	1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah			Nilai Realisasi Investasi	Juta Rupiah	385.297.435	422.583.748	-	297.115.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.115.146	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
		2.12.2.12.01	URUSAN PENANAMAN MODAL																					
		2.12.2.12.01.15	Program Penanaman Modal dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	investor	822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
		2.12.2.12.01.15.03	koordinasi perencanaan dan pengembang perancangan modal	Jumlah perencanaan pengembang perancangan modal	paket	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
		2.12.2.12.01.15.04	peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemertintah dan dunia usaha	Bisnis Gatehwing yang di lakukan & Fasilitas Rapat - Rapat Koordinasi	kali & kali	1 & 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
		2.12.2.12.01.15.08	peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah Pegawai yang di lath	orang	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
		2.12.2.12.01.15.09	penyelenggaraan pameran penanaman modal dan investasi	Jumlah Pameran yang di ikut	kali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
		2.12.2.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kenaikan nilai Realisasi PMDN (juta rupiah)	Juta Rupiah	479.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
		2.12.2.12.01.16.05	pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Jumlah perusahaan / investor yang di lakukan pembinaan dan pengawasan	investor & pengawasan	15 & 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
		2.12.2.12.01.19	Program Pengelolaan Data dan Pengendalian	Sistem Informasi Perjinan Terbangun	Buah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
		2.12.2.12.01.19.01	pengembangan sistem informasi penanaman modal	Aplikasi sistem informasi pelayanan perjinan	paket aplikasi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
		2.12.2.12.01.19.02	penyusunan cetak biru pengembangan penanaman modal	Jumlah cetak biru (master plan)	buku	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
		2.12.2.12.01.19.03	sosialisasi dan peningkatan potensi daerah	- Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan - Jumlah baliho yang didirikan	kali bh	3 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
		2.12.2.12.01.19.04	monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal dan perjinan	- Jumlah Morev - Jumlah Pelaporan	kali pelaporan	12 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp	Kab. Sampang		
		2.12.01.15	Program Perencanaan, Pengembangan Ikim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor	Investor	-	840	248.539.200	2.523	136.411.280	-	-	-	-	-	-	-	-	2.523	384.950.480	Dmptsp Naker	Kab. Sampang		
		2.12.01.15.01	Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Rapat - Rapat Perencanaan Penanaman Modal Daerah dan RKPPMD	kali	-	4	35.749.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	Dmptsp Naker	Kab. Sampang		
		2.12.01.15.02	Pengembangan Ikim Penanaman Modal	- Jumlah Profil / Prospektus Investasi dan Regulasi Kebijakan Penanaman Modal Rapat - Rapat Perencanaan Penanaman Modal Daerah dan RKPPMD (FGD)	Prospektus, peraturan PM dan FGD Kali	-	4	90.000.000	1	61.099.300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	151.099.300	Dmptsp Naker	Kab. Sampang		
		2.12.01.15.03	Promosi Penanaman Modal	- Jumlah Minat Investor dan Jumlah Pameran yang akan di ikut Macmakin' galehwing dan Pameran Laptop dan Printer	Macmakin' kali kali Unit	-	3	122.790.000	-	75.311.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.101.980	Dmptsp Naker	Kab. Sampang		
		2.12.01.16	Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	Juta Rupiah	-	524.274.000	366.913.563	629.178.000	129.881.009	-	-	-	-	-	-	-	-	629.178.000	496.794.572	Dmptsp Naker	Kab. Sampang		
		2.12.01.16.01	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pemantauan / Pengawasan - Jumlah Fasilitas Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha Pelaku Usaha	-	40	19.735.500	-	70.955.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.691.284	Dmptsp Naker	Kab. Sampang		
		2.12.01.16.02	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah Sosialisasi dan Fasilitas Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	-	40	92.073.963	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.073.963	Dmptsp Naker	Kab. Sampang		

				- Jumlah Fasilitas Pemeliharaan pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
		2.12.01.16.03	Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	- Jumlah Pengembangan Aplikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Paket Aplikasi	-	2	255.104.100	1	58.925.225	-	-	-	-	-	-	-	1	314.029.325	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,01	93,13		93,16									93,16		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.17	Program Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Penyelesaian ijin lokasi	buah	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
				Persentase cakupan perijinan yang dilaksanakan dalam PTSP	%	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.18	Program Penyelenggaraan Regulasi Perijinan dan Investasi	Jumlah Regulasi Perijinan yang ditetapkan	Peraturan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.18.01	peraturan peraturan daerah tentang perijinan	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	kali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.18.03	pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengaduan	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.17	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ijin yang diterbitkan Tepat Waktu	%	-	100	233.634.780	100	168.447.350	-	-	-	-	-	-	-	100	402.082.130	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.17.01	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor 1	Jumlah pemohon izin yang telah diterbitkan di Sektor I	ijin	-	44	14.551.000	40	81.903.550	-	-	-	-	-	-	-	40	96.454.550	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.17.02	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor 2	Jumlah pemohon izin yang telah diterbitkan di Sektor II	ijin	-	21	64.150.780	23	23.836.500	-	-	-	-	-	-	-	23	87.987.280	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.17.03	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor 3	Jumlah pemohon izin yang telah diterbitkan di Sektor III	ijin	-	32	154.933.000	33	62.707.300	-	-	-	-	-	-	-	33	217.640.300	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.18	Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti	%	-	100	82.140.751	100	32.566.400	-	-	-	-	-	-	-	100	114.707.151	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.18.01	Fasilitasi Pengaduan dan Hormasi Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah Pengaduan	Pengaduan	-	9	16.898.000	4	21.692.400	-	-	-	-	-	-	-	4	38.590.400	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.18.02	Fasilitasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Peningkatan SDM	orang	-	70	34.196.751	2	10.874.000	-	-	-	-	-	-	-	2	45.070.751	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.18.03	Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Jumlah Laporan	laporan	-	12	31.046.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	31.046.000	Dmptsp Naker	Kab. Sampang

PENUNJANG (ADUM)																		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Surat	1.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air, listrik, telepon dan faksimile	rek	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas / operasional	STNK Kendaraan Dinas Rods 2 Dan Rods 4	unit	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bahan Pembersih, Peralatan Kebersihan Dan Jasa Cleaning Service	jens	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	jens	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan penggandaan	jens	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	jens	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Spanduk, umbul - umbul dan bendera	jens	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan	Pembayaran surat kabar	exp	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Mamin Staf Meeting dan mamin tamu	orang	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	BBM dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	liter & Kali	490 & 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Teraga Honor Daerah	orang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	BBM dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	liter & Kali	190 & 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Meja Kerja Dan Kursi Kerja	unit	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.02.11	Pengadaan Komputer	Flashdisk, Mouse, Hardisk, Printer dan Laptop	unit	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.02.12	Pengadaan Peralatan Kantor	Lemari Anjip Pintu 2 stding , filing kabinet dan fingerprint	unit	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.02.19	Pengadaan Perlengkapan Kantor	AC, Pompa air dan jenset	unit	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BBM, Pelumas, Service dan suku cadang kendaraan dinas	unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jens	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.03.04	Pengadaan Pakatan Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakatan dinas Haran Pegawai	Orang	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	71,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	PNS Yang ikut Diklat / binaek	Orang	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan laporan kinerja tepat waktu	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.2.12.01.01.06.01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan lnhisar realisasi kinerja QPD	Laporan Capaian Kinerja	Dok	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang

	2.12.2.12.01.01.06.02	penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	Dok	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
	2.12.2.12.01.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan akhir tahun	Dok	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
	2.12.2.12.01.01.06.05	penyusunan renja, RKA-SKPD dan DPA OPD	Penyusunan Renja, RKA, SKPD da DPA OPD	Dok	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
	2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi	%	-	100	366.395.418	96,79	310.436.868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,79	676.832.286	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
	2.12.01.01.01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	- Jumlah surat yang terfirim	Surat	-	2.200	165.308.445	1.500	221.708.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	387.016.635	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
			- Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Rekening	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perijinan	Unit	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			- Jumlah tenaga kebersihan	Ob	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			- Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Jenis	-	25	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			- Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	Ob	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			- Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	Ob	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.01.01.02		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	- Jumlah ATK	jenis	-	45	85.726.798	46	42.667.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	128.394.080	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		- Jumlah barang cetakan		jenis	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		- Jumlah barang pengoperasian		Jenis	-	12	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		- Jumlah komponen instalasi listrik		Jenis	-	19	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		- Cakupan pemenuhan bahan bacaan		Exp	-	24	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		- Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat		Orang	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.01.01.03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	- Jumlah koordinasi dalam daerah	lter & Kal	-	1206 & 40	115.360.175	450 lter & 12 kal	46.061.396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 lter & 12 kal	161.421.571	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
			- Jumlah koordinasi luar daerah (kal)	lter & Kal	-	79	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang

	2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%	-	100	1.104.180.025	100	315.739.490	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.419.919.515	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.01.02.01	Pembangunan /Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	Unit	-	1	915.446.315	0	222.883.790	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1.138.330.105	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			- Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	-	1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.01.02.03	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	- Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	Unit	-	0	38.402.850	-	29.793.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.196.750	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			- Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	Unit	-	0		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			- Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	Unit	-	4		4		-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.01.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah pengadaan peralatan kantor	Unit	-	16	150.330.860	4	63.061.800	-	-	-	-	-	-	-	-	4	213.392.660	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			- Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	-	6		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			- Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Unit	-	9		6		-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			- Jumlah spanduk/lambu-umbubendera yang disediakan	Jenis	-	8		32		-	-	-	-	-	-	-	-	32	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.01.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	-	100	31.408.624	100	1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	33.308.624	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.01.03.01	Pelaksanaan Bimtek / Sosialisasi /Seminar	Jumlah ASN yang mengikut Bimtek/ Sosialisasi/ seminar	Orang	-	10	31.408.624	1	1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.308.624	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.01.04	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Pelaporan Pelayanan Informasi Publik	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tepat waktu	%	-	100	48.076.590	83,33	19.008.000	-	-	-	-	-	-	-	-	83,33	67.084.590	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.01.04.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	- Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/ Non Fisik, Jumlah Laporan Triwulan, Jumlah Laporan Semesteran, Laporan akhir Tahun, CALUK dan LKGP	Dokumen	-	5	14.988.975	6	10.011.300	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25.000.275	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.01.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Jumlah Dokumen Rencana, Renja, RKA, DPA	Dokumen	-	5	14.977.865	4	8.996.700	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23.974.565	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.12.01.04.03	Peningkatan Pelayanan Publik	- Jumlah Dok. SKM, Jumlah Promosi Pelayanan Publik Peningkat Daerah	Dokumen	-	2	18.108.750	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.108.750	Dmptsp Naker	Kab. Sampang

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA PERUBAHAN (DISI TARGET 2021-2024)																			Dmptsp Naker	Kab. Sampang			
1. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja				Tingkat Pengangguran terbuka	%				2,41			3,35			3,08			2,78	2,35	2,35%	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
	1. Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%				56,91			75,9			95,26			95,39	95,52	95,52	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											0	524.869.591			833.358.207		869.993.311		2.228.221.109	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang dilatih di BLK	%							79,01	0	68,75	37.464.000	69,23%	833.358.207	69,29%	869.993.311	69,29%	1.740.815.518	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang dilatih di BLK	%							79,01	0	68,75	37.464.000	69,23%	833.358.207	69,29%	869.993.311	69,29%	1.740.815.518	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Pengangguran dan Pencari Kerja yang dilatih	Orang							0	0	114	10.206.000	400	800.000.000	450	830.000.000	450	1.640.206.000	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Perlatan dan Sarana urek Pelatihan di BLK yang dipelihara	Unit							0	0	112	27.258.000,00	115	33.358.207	130	39.993.311	130	100.609.518	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang disalurkan	%								536.224.745	77,23	437.022.724	77,85%	408.691.523	78,44%	426.657.934	78,44%	1.808.596.926	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitas	%							75,9	15.580.000	77,23	183.751.397	77,85%	171.839.296	78,44%	179.393.398	78,44%	550.564.001	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Sosialisasi bursa tenaga kerja dan rekumen Tenaga Kerja	Orang							0	4.600.000	120	49.364.125	120	46.163.960	120	48.193.436	120	148.321.521	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
				Jumlah Perpindahan Masyarakat ke Daerah Transmigrasi (KK)	KK							0		5		5		5		5		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Sosialisasi bursa tenaga kerja	Kegiatan							1	10.980.000	7	134.387.272	7	125.675.246	7	131.199.962	7	402.242.480	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.04.2.03	Pengolahan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang disalurkan	%							75,9	0	77,23	56.442.239	77,85%	52.783.215	78,44%	55.103.608	78,44%	164.329.062	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	Job Fair	Kegiatan							0	0	1	56.442.239	1	52.783.215	1	55.103.608	1	164.329.062	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang disalurkan	%							75,9	520.644.745	77,23	196.829.068	77,85%	184.069.102	78,44%	192.160.928	78,44%	1.093.703.863	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.04.2.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pendampingan PMI Bermasalah	orang							4476	520.644.745	40	196.829.068	50	184.069.102	60	192.160.928	60	1.093.703.863	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	%							100	32.400.973	100	50.382.857	100	47.116.659	100	49.187.946	100	179.088.445	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	%							100	15.265.700	100	34.480.825	100	32.245.510	100	36.630.050	100	118.622.085	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.05.2.01.03	Penyenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang kelenagakerjaan	Perusahaan							80	15.265.700	150	34.480.825	150	32.245.510	150	36.630.050	150	118.622.085	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
				Penyusunan UMK	Peraturan							0		1		1		1		1		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
				Jumlah Kecamatan yang di data dan di survey (KHL dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten	Kecamatan							10		14		14		14		14		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	%							100	0	100	15.902.042	100	14.871.149	100	12.557.896	100	43.331.087	Dmptsp Naker	Kab. Sampang

		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	Kasus	-	-	-	-	0	0	3	15.902.042	2	14.871.149	2	12.557.896	2	43.331.087	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
	2. Meningkatnya Investasi Daerah			Persentase Naikannya Realisasi Investasi	%	-	-	-	-	0,13	0,16%			0,24%		0,32%		0,32%		Dmptpt Naker	Kab. Sampang
	2. Meningkatnya realisasi Investasi Daerah			Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp	-	-	-	-	297.513,257	297.823,870		298.523,870	299.472,870	299.472,870	299.472,870				Dmptpt Naker	Kab. Sampang
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Potensi Investasi	Jenis	-	-	-	-	0	12.520.806	2	116.930.706	4	202.867.576	6	211.785.799	6	544.104.887	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi	Jenis	-	-	-	-	0	12.520.806	2	116.930.706	4	202.867.576	6	211.785.799	6	544.104.887	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
		2.18.02.2.02.02	Perwujudan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Prospektus Kabupaten	prospektus	-	-	-	-	0	12.520.806	2	116.930.706	2	202.867.576	2	211.785.799	2	544.104.887	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
				Rapat-rapat perencanaan Penanaman Modal dan	Kali	-	-	-	-	0		3		3		4		4		Dmptpt Naker	Kab. Sampang
				*Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
		2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	Investor	-	-	-	-	3563	12.568.360	2700	162.310.211	2800	151.788.005	2900	158.460.729	2900	485.127.305	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor	Investor	-	-	-	-	3563	12.568.360	2700	162.310.211	2800	151.788.005	2900	158.460.729	2900	485.127.305	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Investor / Jumlah Matmacking	Matmacking	-	-	-	-	0	12.568.360	1	162.310.211	1	151.788.005	1	158.460.729	1	485.127.305	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
				Jumlah Pameran Investasi yang diikuti	Kali Pameran	-	-	-	-	0		2		2		2		2		Dmptpt Naker	Kab. Sampang
				*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSIANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	Pelaku Usaha	-	-	-	-	58	193.746.708	180	174.084.978	185	511.115.565	190	533.584.621	675	1.412.531.872	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	Pelaku Usaha	-	-	-	-	58	193.746.708	180	174.084.978	185	511.115.565	190	533.584.621	675	1.412.531.872	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan	pelaku usaha	-	-	-	-	55	23.117.408	70	35.792.451	80	105.085.360	90	109.706.774	90	273.701.993	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
				*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha	-	-	-	-	406	161.946.000	40	102.489.331	50	300.909.894	50	314.138.137	50	879.483.362	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
				Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	kali	-	-	-	-	0		2		2		2		2		Dmptpt Naker	Kab. Sampang
				*Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman modal	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500	500	500	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	pelaku usaha	-	-	-	-	30	8.683.300	70	35.803.196	80	105.120.311	90	109.739.710	90	259.346.517	Dmptpt Naker	Kab. Sampang
				*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	80	90	90	90	90	90	Dmptpt Naker	Kab. Sampang

		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN	Juta Rp	-	-	-	-	654.170,714	76.158.560	745.128,403	194.574.920	849.046,211	225.293.173	967.865,730	235.197.243	967.865,730	731.223.896	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Investasi PMDN	Juta Rupiah	-	-	-	-	654.170,714	76.158.560	745.128,403	194.574.920	849.046,211	225.293.173	967.865,730	235.197.243	967.865,730	731.223.896	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemeliharaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengembangan sistem Informasi Penanaman Modal (SPP)	paket Aplikasi	-	-	-	-	0	76.158.560	1	194.574.920	2	225.293.173	2	235.197.243	2	731.223.896	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
				Jumlah Pengolahan Data Penanaman Modal	laporan	-	-	-	-	12		12		12		12		12			Dmptsp Naker	Kab. Sampang
				* Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik yang di olah, Diuji dan Dimanfaatkan.	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-		Dmptsp Naker
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,01	93,13		93,16	93,26	-	93,35	-	93,50	-	93,75	-	93,75	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu	%	-	-	-	-	100	103.950.000	100	218.473.142	100	204.310.019	100	213.291.653	100	740.024.814	Dmptsp Naker	Kab. Sampang	
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang diindaklanjuti	%						100		100		100		100		100			Dmptsp Naker

	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pinta dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	%	-	-	-	-	-	100	103.950.000	100	218.473.142	100	204.310.019	100	213.291.653	100	740.024.814	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Persentase Pengabdian Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	-	100		100		100		100		100		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	-	-	-	-	-	0		-		2		2		2		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin dan Non Izn yang diterbitkan di sektor I	Izn	-	-	-	-	-	10	100.687.500	-	176.608.529	-	165.159.394	-	172.419.960	-	614.875.383	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Izn dan Non Izn yang diterbitkan di sektor II	Izn	-	-	-	-	-	4044		-		-		-		-		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Izn dan Non Izn yang diterbitkan di sektor III	Izn	-	-	-	-	-	1941		-		-		-		-		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Izn OSS	Izn	-	-	-	-	-	-	2300		2400		2500		2500		2500	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Izn Non OSS	Izn	-	-	-	-	-	-	4200		2500		2600		2600		2600	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-			1500		1600		1600		1600	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengabdian Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan tindak lanjut yang ditangani	Laporan	-	-	-	-	-	0	3.262.500	10	41.864.613	10	39.150.625	10	40.871.693	10	125.149.431	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Perizinan dan Non Perizinan	Kali	-	-	-	-	-	-		5		5		5		5		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Laporan SP, Maksud Pelayanan, Koneksi Pelayanan	Dokumen	-	-	-	-	-	-		3		3		3		3		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelola Pengabdian Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	-	-	-	-	-	-			300		350		350		350	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
PENUNJANG (ADUM)																					
	2.18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	%	-	-	-	-	-	100	5.047.587.496	100	5.829.996.002	100	5.452.050.458	100	5.691.727.026	100	22.021.360.982	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Terasukan Tepat Waktu	%	-	-	-	-	-	100	24.791.025	100	25.412.223	100	23.764.805	100	24.809.525	100	98.777.578	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja, SOP)	Dokumen	-	-	-	-	-	3	2.956.200	3	3.057.454	3	2.859.250	3	2.984.900	3	11.857.808	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-			3		3		3		3	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	1	2.932.200	1	3.093.085	1	2.852.500	1	3.019.700	1	11.537.485	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-			1		1		1		1	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	1	2.977.300	1	3.037.964	1	2.841.000	1	2.965.900	1	11.622.164	Dmptsp Naker	Kab. Sampang

				*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen								1		1			1		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	1	2.982.800	1	3.100.732	1	2.899.700	1	3.027.100	1	12.010.332	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen									1		1			1		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	1	2.967.925	1	3.104.982	1	2.903.600	1	3.031.350	1	12.007.857	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen									1		1			1		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD (LPPD, LKPU, SPP, SAKIP, RB)	Dokumen	-	-	-	-	-	5	9.974.600	5	10.018.002	5	9.368.755	5	9.780.575	5	39.141.932	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen									5		5			5		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	-	-	-	-	-	100	3.488.922.408	100	4.420.703.314	100	4.134.119.050	100	4.315.858.280	100	16.359.603.052	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	Orang	-	-	-	-	-	60	3.465.032.058	50	4.412.651.172	50	4.126.588.900	50	4.307.997.100	50	16.312.269.230	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Koreksi Daerah yang dibayarkan	Ob	-	-	-	-	-	1		1		1	1			1	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan									50		50			50		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	-	-	-	-	-	46	15.919.000	-	0	-	0	-	0	-	15.919.000	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	1	2.989.900	1	3.043.549	1	2.846.200	1	2.971.300	1	11.850.949	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan									1		1			1		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	3	4.981.450	3	5.008.593	3	4.683.950	3	4.889.880	3	19.563.873	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan									3		3			3		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	%	-	-	-	-	-	100	2.224.900	100	3.360.854	100	3.360.853	100	3.281.145	100	12.227.752	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Rekrutmen Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBM	Dokumen	-	-	-	-	-	1	999.300	1	2.126.561	1	2.126.560	1	2.076.100	1	7.328.521	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Dokumen RKPBMD	Dokumen	-	-	-	-	-	1		1		1	1			1	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang

				* Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2		2		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.03.06	Peretasuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Semesteran Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	-	-	4	1.225.600	4	1.234.293	4	1.234.293	4	1.205.045	4	4.899.231		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			* Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	4		4		4			Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	Orang	-	-	-	-	0	0	10	60.322.000	10	56.411.460	10	58.891.353	10	175.624.813		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ok	-	-	-	-	-	0	10	34.470.000	10	32.235.000	10	33.652.400	10	100.357.400		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			* Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	10		10		10			Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	Ok	-	-	-	-	-	0	7	25.852.000	7	24.176.460	7	25.238.953	7	75.267.413		Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			* Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	7		7		7			Dmptsp Naker	Kab. Sampang

	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	100	177.739.002	100	331.851.820	100	310.338.610	100	323.981.350	100	1.143.910.782	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Jenis	-	-	-	-	-	24	90.856.488	15	72.742.159	15	68.026.400	15	71.016.950	15	302.641.997	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	Jenis	-	-	-	-	-	56	13.353.299	56	14.854.461	56	13.891.500	56	14.502.160	56	56.601.420	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Spanduk/ Umbul- umbul Bendera yang diadakan	Jenis	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	65	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	-	-	-	-	-	-	0	50	19.865.050	50	18.577.250	50	19.393.900	50	57.836.200	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jenis	-	-	-	-	-	10	12.076.215	10	15.165.150	10	14.182.000	10	14.805.400	10	56.228.765	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah belajar penggandaan yang disediakan	Jenis	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	E-p	-	-	-	-	-	48	3.820.000	4	4.560.000	4	4.264.300	4	4.451.850	4	17.096.150	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	Ob	-	-	-	-	-	380	7.919.000	198	7.920.000	250	7.406.500	300	7.732.162	300	30.977.662	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	Orang	-	-	-	-	-	50	49.714.000	50	196.745.000	50	183.990.660	50	192.078.928	50	622.528.588	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	kal	-	-	-	-	-	17	17	300	350	350	400	400	400	400	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	kal	-	-	-	-	-	26	26	450	500	500	500	500	500	500	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah kebutuhan BBM	liter	-	-	-	-	-	600	600	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%	-	-	-	-	-	100	501.056.148	100	149.113.177	100	139.446.500	100	145.576.700	100	935.192.525	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	-	-	-	-	-	47	99.360.500	33	149.113.177	30	139.446.500	40	145.576.700	40	533.496.877	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	40	40	40	40	40	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun di rehab	Unit	-	-	-	-	-	1	401.695.648	-	0	-	0	-	0	-	401.695.648	Dmptsp Naker	Kab. Sampang

			*Jumlah Unit gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	-	-	-	100	374.218.396	100	622.445.354	100	582.093.600	100	607.682.900	100	2.186.440.250	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat	-	-	-	2250	1.505.000	2250	2.505.000	2300	2.342.600	2350	2.445.500	2350	8.798.100	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Bulan	-	-	-	12	106.763.396	12	229.940.354	12	215.033.800	12	224.486.800	12	776.224.350	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Op	-	-	-	26	265.950.000	26	390.000.000	23	364.717.200	23	380.750.600	23	1.401.417.800	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	-	-	-	100	106.771.044	100	193.787.538	100	181.224.700	100	189.191.500	100	670.974.782	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	-	-	-	6	51.192.044	6	76.948.280	6	71.959.800	6	75.123.300	6	275.223.424	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	Unit	-	-	-	13	-	13	-	13	13	13	13	13	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	unit	-	-	-	-	-	-	-	19	19	19	19	19	19	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	Unit	-	-	-	26	15.455.500	54	19.400.000	56	18.142.300	58	18.939.800	58	71.837.600	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang dipelihara	Unit	-	-	-	2	40.123.500	2	97.439.258	2	91.122.600	2	95.128.400	2	323.813.758	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	%	-	-	-	100	249.600	100	22.999.722	100	21.290.880	100	22.454.273	100	66.994.475	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
	2.18.01.2.13.02	fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	Dokumen	-	-	-	1	249.600	1	22.999.722	1	21.290.880	1	22.454.273	1	66.994.475	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			Jumlah Promosi pelayanan Publik Perangkat Daerah	Kali	-	-	-	0	-	1	-	1	1	1	1	1	0	Dmptsp Naker	Kab. Sampang
			*Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	laporan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Dmptsp Naker	Kab. Sampang

**PEMETAAN ANTARA NOMEKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA-REJVA PERANGKAT DAERAH
DENGAN NOMENKLATUR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 90 TAHUN 2019**

DPMPSTP KAB. SAMPANG

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/REJVA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN		
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	PAGU SUB KEGIATAN VER 00	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
DPMPSTP	02.12.01.15	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENANAMAN MODAL	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMDN / PMA)	867	Investor			250.000.000			Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMDN / PMA)	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2.12.2.12.01.15.02			Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Profil / Prospektus Investasi	1,00	Prospektus/ Review Peraturan	Penyediaan peta Potensi dan peluang usaha Kabupaten/kota	Jumlah peta/profil Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peta/profil Potensi Investasi Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Profil / Prospektus Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	2	2.02	2
				Rapat-rapat perencanaan Penanaman Modal dan RKPPMD		4,00	peta Peluang investasi dan rapat FGD		Rapat-rapat perencanaan Penanaman Modal dan RKPPMD			Rapat-rapat perencanaan Penanaman Modal dan RKPPMD		Rapat-rapat perencanaan Penanaman Modal dan RKPPMD							
	2.12.2.12.01.15.02			Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Investor dan Jumlah Pameran yang di ikuti	2	matcmaking dan pameran	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Investor dan Jumlah Pameran yang di ikuti	150.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Minat Investor dan Jumlah Pameran yang di ikuti	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Minat Investor dan Jumlah Pameran yang di ikuti	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	3	2.01	2
	2.12.2.12.01.16			Program Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	654.171,00	Juta Rupiah			391.806.350			Program Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2.12.2.12.01.16.01			Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan dan Pengawasan	70	Pelaku Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan dan Pengawasan	35.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan dan Pengawasan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan dan Pengawasan	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	5	2.01	1
										36.694.050											
	2.12.2.12.01.16.01			Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal	40,00	Pelaku Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal	117.552.900	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Fasilitas permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	5	2.01	2
					Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	2,00	Pelaku Usaha		Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan			Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan		Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan							
	2.12.2.12.01.16.03			Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pengembangan sistem Informasi Penanaman Modal	1,00	Paket Aplikasi	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem	Jumlah Pengembangan sistem Informasi Penanaman Modal	202.559.400	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengembangan sistem Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pengembangan sistem Informasi Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	6	2.01	1
					Jumlah Pengolahan Data Penanaman Modal	12,00	Laporan		Jumlah Pengolahan Data Penanaman Modal			Jumlah Pengolahan Data Penanaman Modal		Jumlah Pengolahan Data Penanaman Modal							
	2.12.2.12.01.17			Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	100,00	%			200.000.000			Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2.12.2.12.01.17.01			Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor I	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor I	50,00	Izin	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor I	50.000.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor I	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor I	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	4	2.01	1
	2.12.2.12.01.17.02			Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor II	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor II	1000	Izin	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor II	75.000.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor II	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor II	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	4	2.01	1
	2.12.2.12.01.17.03			Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor III	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor III	60	Izin	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor III	75.000.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor III	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	04	2.01	01

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN						
	KODE	URUSAN	BIDANG IRIUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	PAGU SUB KEGIATAN VER	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG IRIUSAN	URUSAN	KODE							
						2021				90							12		13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	2.12.2.12.01.18			Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%			70.000.000			Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2.12.2.12.01.18.01			Fasilitasi Pengaduan dan Informasi Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah Laporan tindak lanjut yang ditangani	10	laporan	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	Jumlah Laporan tindak lanjut yang ditangani	70.000.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan tindak lanjut yang ditangani	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan tindak lanjut yang ditangani	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	04	2.01	03			
	2.12.2.12.01.18.02			Fasilitasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan staf dalam pelayanan perizinan	40	orang																Tidak Ada Sub Kegiatan Yang Cocok	
	0.08402776		TENAGA KERJA																					
	2.01.2.12.01.15			Program Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang difasilitasi	76,57	%			612.385.200			Program Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang difasilitasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
					Angka sengketa pengusaha pekerja	2	%							Angka sengketa pengusaha pekerja										
	2.01.2.12.01.15.01			Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah Peserta Pelatihan Proseesing hasil pertanian	60	org	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Peserta Pelatihan Proseesing hasil pertanian	243.337.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Proseesing hasil pertanian	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Peserta Pelatihan Proseesing hasil pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	03	2.01	01			
	2.01.2.12.01.15.02			Fasilitasi hubungan industrial	Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	150	Perusahaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	50.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)	Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	07	05	2.01	03			
					penyusunan UMK	1	dok		penyusunan UMK			penyusunan UMK		penyusunan UMK										
					Jumlah Kecamatan yang didata dan disurvei (KHL dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten	14	Kec		Jumlah Kecamatan yang didata dan disurvei (KHL dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten			Jumlah Kecamatan yang didata dan disurvei (KHL dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten		Jumlah Kecamatan yang didata dan disurvei (KHL dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten										
					Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	3	kasus	Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	69.048.200	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	07	05	2.02	02			
	2.01.2.12.01.15.03			Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sosialisasi Bursa Tenaga Kerja dan Rekrutmen Tenaga Kerja	210	org	Penyediaan Sumber Daya Pelayanaan antar Kerja	Sosialisasi Bursa Tenaga Kerja dan Rekrutmen Tenaga Kerja	80.000.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Bursa Tenaga Kerja dan Rekrutmen Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Sosialisasi Bursa Tenaga Kerja dan Rekrutmen Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	04	2.01	01			
					Jumlah Perpindahan Masyarakat ke daerah Transmigrasi (KK)	5	KK		Jumlah Perpindahan Masyarakat ke daerah Transmigrasi (KK)			Jumlah Perpindahan Masyarakat ke daerah Transmigrasi (KK)		Jumlah Perpindahan Masyarakat ke daerah Transmigrasi (KK)										
					Job fair	1	kgf	Job Fair/Bursa Kerja	Job fair	80.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job fair	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Job fair	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	07	04	2.03	03			
					Jumlah Pendampingan PMI bermasalah	35	org	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI/Pakacis	Jumlah Pendampingan PMI bermasalah	90.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan PMI bermasalah	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Pendampingan PMI bermasalah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	07	04	2.04	01			

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/REJENIA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN				
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	PAGU SUB KEGIATAN VER 90	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19			
	2.01.2.12.01.16			Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pencari kerja yang dilatih di BLK	68.18	%			1.247.495.200			Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pencari kerja yang dilatih di BLK	TENAGA KERJA	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	07	03	2.05			
	2.01.2.12.01.16.01			Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120	org	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.247.495.200	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	07	03	2.05	01	Masuk ke DBHCT	
	2.01.2.12.01.16.02			Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana /prasarana kelembagaan pelatihan	Jumlah Peralatan dan sarana untuk pelatihan	6	paket		Jumlah Peralatan dan sarana untuk pelatihan			Jumlah Peralatan dan sarana untuk pelatihan		Jumlah Peralatan dan sarana untuk pelatihan									
	2.01.2.12.01.16.05			Bantuan sarana produk bagi masyarakat/kelempok masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang mendapatkan Bantuan Sarana Produk Sesuai dengan	2	kelompok		Jumlah Kelompok Masyarakat Yang mendapatkan Bantuan Sarana Produk Sesuai dengan			Jumlah Kelompok Masyarakat Yang mendapatkan Bantuan Sarana Produk Sesuai dengan		Jumlah Kelompok Masyarakat Yang mendapatkan Bantuan Sarana Produk Sesuai dengan									
	2.12.2.12.01.01			Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	100	%			423.081.150			Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan Administrasi dan Jasa Perkantoran									
	2.12.2.12.01.01.01			Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah Surat yang terkirim	2250	Surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	20.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Surat yang terkirim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Surat yang terkirim				X	XX	01	2.03	01	
				225.000.000	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan listrik, air, dan Komunikasi	12	Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan listrik, air, dan Komunikasi	55.000.000	Administrasi Umum	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan listrik, air, dan Komunikasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan listrik, air, dan Komunikasi				X	XX	01	2.03	02	
					Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memperoleh Jasa Perizinan	11	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memperoleh Jasa Perizinan	40.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memperoleh Jasa Perizinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memperoleh Jasa Perizinan				X	XX	01	2.03	06	
					Jumlah Tenaga Kebersihan	4	Ob	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	50.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Tenaga Kebersihan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Tenaga Kebersihan				X	XX	01	2.03	08	
					Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	24	Exp	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	20.000.000	Administrasi Umum	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran				X	XX	01	2.03	15	
					Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	84	Orang	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat				X	XX	01	2.03	17	
					Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pendukung Administrasi Teknis	1	Orang	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pendukung Administrasi Teknis	20.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pendukung Administrasi Teknis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pendukung Administrasi Teknis				X	XX	01	2.03	17	
	2.12.2.12.01.01.02			Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	46	Jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	25.161.150	Administrasi Umum	Jumlah ATK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah ATK				X	XX	01	2.03	10	
				85.161.150	Jumlah Barang Cetak	10	Jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	10.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Barang Cetak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Barang Cetak				X	XX	01	2.03	11	
					Jumlah Barang Penggandaan	10	Jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Penggandaan	10.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Barang Penggandaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Barang Penggandaan				X	XX	01	2.03	11	
					Jumlah Komponen Instalasi Listrik	20	Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	20.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Komponen Instalasi Listrik				X	XX	01	2.03	12	
					Jumlah Alat Kebersihan yang disediakan	26	Jenis	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan yang disediakan	20.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Alat Kebersihan yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Alat Kebersihan yang disediakan				X	XX	01	2.03	08	
	2.12.2.12.01.01.03			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Koordinasi dalam Dalam	1000 & 96	Liter/kali															Tidak Ada Sub Kegiatan Yang Cocok	
					Jumlah Koordinasi Luar Daerah	460 & 48	Liter/kali	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilakui	112.920.000	Administrasi Umum	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilakui	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran				X	XX	01	2.03	18	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN					
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	PAGU SUB KEGIATAN VER 90	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19			
	2.12.2.12.01.02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100	%			1.403.766.600			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik										
	2.12.2.12.01.02.01			Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	1	Unit	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Sub Kegiatan Yang Cocok		
				1.133.453.300	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	Unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	133.453.300	Administrasi Umum	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara					X	XX	01	2.03	28	
	2.12.2.12.01.02.03			Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang diadakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang diadakan		Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang diadakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang diadakan					X	XX	01	2.03	20	
					Jumlah Kendaraan Dinas R2 yang diadakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas R2 yang diadakan		Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas R2 yang diadakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Kendaraan Dinas R2 yang diadakan					X	XX	01	2.03	20	
					Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang dipelihara	4	Unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang dipelihara	50.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang dipelihara					X	XX	01	2.03	28	
	2.12.2.12.01.02.04			Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	16	Unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	85.313.300	Administrasi Umum	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor					X	XX	01	2.03	24	
				220.313.300	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	6	Unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	35.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara					X	XX	01	2.03	34	
					Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	6	Unit	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	80.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor					X	XX	01	2.03	22	
					Jumlah Spanduk/ umbul-umbul/ bendera yang disediakan	8	Unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Spanduk/ umbul-umbul/ bendera yang disediakan	20.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Spanduk/ umbul-umbul/ bendera yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Spanduk/ umbul-umbul/ bendera yang disediakan					X	XX	01	2.03	24	Tidak Ada Sub Kegiatan Yang Cocok
	2.12.2.12.01.03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	100	%			50.000.000			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur										
	2.12.2.12.01.03.01			Pelaksanaan BinteK / Sosialisasi seminar	Jumlah ASN yang mengikuti BinteK/ Seminar / Sosialisasi	10	Orang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti BinteK/ Seminar / Sosialisasi	50.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti BinteK/ Seminar / Sosialisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah ASN yang mengikuti BinteK/ Seminar / Sosialisasi					X	XX	01	2.04	09	
	2.12.2.12.01.04			Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik dan Tepat Waktu	100	%			50.000.000			Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik dan Tepat Waktu										
	2.12.2.12.01.04.01			Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/ Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LARIP	6	Dok	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/ Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LARIP	5.000.000	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/ Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LARIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/ Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LARIP					X	XX	01	2.02	06	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/REJENIA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									KETERANGAN				
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	PAGU SUB KEGIATAN VER 90	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				15.000.000				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		5.000.000	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	01	2.02	07	
								Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		5.000.000	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	01	2.02	09	
	2.12.2.12.01.04.02			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4	Dok	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD	8.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD			X	XX	01	2.01	01	
				25.000.000				Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		7.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						X	XX	01	2.01	02	
	2.12.2.12.01.04.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen SKM	2	Dok			10.000.000							-	-	-	-	-	Tidak Ada Sub Kegiatan Yang Cocok
					Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah					10.000.000							-	-	-	-	-	Tidak Ada Sub Kegiatan Yang Cocok
TOTAL										4.698.534.500												

Sampang, Agustus 2020

PIA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMPANG

SLAMET WAHYU RIYADI, AP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721105 199501 1 001